

KEGAGALAN PARTAI POLITIK BARU DI PROVINSI JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF PELEMBAGAAN POLITIK

Hatta Abdi Muhammad¹, Nabil Lintang Pamungkas^{2*)}, Dony Anggara³

^{1,3} Departement of Political Science, Jambi University.

² Departement of Politics and Government, Gadjah Mada University.

*)korespondensi: nabilpamungkas16@mail.ugm.ac.id

Abstract

The relationship between institutionalization of party and electoral is an important theme because the strength of institutionalization is demonstrated through party performance in elections. However, the tendency in strengthening party institutionalization can't be separated from the presence of inherent figures. Some literature highlights that institutionalization is a conflicting entity with the emergence of strong figures. This article specifically discusses and explains that the problems of institutionalization and figures can intertwine each other. Because the party's relationship with the electoral arena can't be separated, the need for figures as a reinforcing variable in terms of political contestation, especially new parties in Jambi Province. Problem arises from the new parties in Jambi Province is that they can't won in 2019 election. In fact, their party's existence is quite well institutionalized. This article uses descriptive qualitative methods to analyze deeply the phenomena that occur by utilizing secondary and primary data from various informants. Various data is coded, analyzed interactively and confirmed its validity then presented systematically. The results showed that the institutionalization that had been designed by the new parties was not able to produce a significant vote gain. People is more familiar with figures within the party, thus voter preferences see figures more than parties. New parties need to increase their popularity by working with figures that are acceptable to the public. At the end, the author offers how figures can appear in new parties by carrying out a process of political recruitment that emphasizes the involvement of candidates who have the potential to compete in elections.

Article Histori:

Accepted: 18/6/2020

Review: 29/9/2020

Publish: 31/10/2020

Keyword: *New Party, Elections, Party Institutionalization, Political Figure.*

1. PENDAHULUAN

Gelombang naik-turunnya keterpilihan partai politik dalam kontestasi elektoral menjadi hal yang memungkinkan dalam negara demokrasi baru. Partai politik diakui sebagai sebuah organisasi yang harus dimiliki oleh suatu negara yang menganut sistem politik yang demokratis (Duverger, 1954; Downs, 1957; Aldrich, 1995). Keterbatasan pengalaman dalam mengelola partai politik berimplikasi kuat terhadap sistem kepartaian dan pemerintahan suatu

negara. Sebagaimana Key (1964) mencatat bahwa hanya melalui kompetisi partai politik akan lahirnya suksesi pemerintahan sebagai fungsi dari keputusan rakyat. Beberapa sarjana juga menganggap bahwa demokratisnya suatu negara dilihat dari mapannya sistem kepartaian yang diukur melalui pelebagaan sistem kepartaian (Jones, 2007; Mainwaring & Scully, 1995).

Scott Mainwaring dan Timothy Scully (1995) menawarkan empat dimensi utama terkait pelebagaan sistem kepartaian,

diantaranya; stabilitas kompetisi antar partai, terjangkaunya akar rumput partai di level masyarakat, legitimasi partai, solidaritas sebuah partai dilihat dari tata kelola organisasi secara baik. Secara konseptual, dimensi ini bersifat kontradiktif satu sama lain. Wallis (2003) misalnya berpendapat bahwa dimasukkannya dimensi terakhir terkait internal organisasi partai sebagai sebuah masalah. Memasukkan dimensi tersebut pada akhirnya menghasilkan hasil analisis yang kemudian berdampak hanya pada satu partai, namun tidak menghasilkan analisis terhadap pelebagaan sistem antar partai itu sendiri.

Dalam perspektif tersebut, perlu adanya kecermatan dalam mendudukan perkara ini terlebih dahulu. Pelebagaan sistem kepartaian dan pelebagaan partai politik memiliki fokus analisa yang berbeda.

Secara sederhana, pelebagaan sistem kepartaian memfokuskan pada pola kompetisi antar partai yang terbangun dalam sistem politik, sedangkan pelebagaan partai memfokuskan kajian pada pelebagaan partai-partai tertentu saja. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, dua pendekatan tersebut memiliki keterkaitan relasi satu sama lain terkait

pentingnya pelebagaan partai politik dalam sistem politik dan sistem pemerintahan. Tentu perkara ini bukan menjadi perhatian pada penelitian kali ini, fokus dari artikel ini adalah menjelaskan pelebagaan partai politik tertentu khususnya partai politik baru yang berkontestasi di ranah lokal, serta menempatkan politik figur sebagai aspek integral dengan konsep pelebagaan partai.

Perhatian terhadap figur politik sebagai bagian dari pelebagaan partai politik yang kemudian menginspirasi artikel ini dengan melihat pelebagaan partai politik baru seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Garuda dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang berkontestasi dalam Pemilu legislatif di Provinsi Jambi Tahun 2019. Kegagalan partai politik baru tersebut disebabkan perolehan angka elektoral yang rendah. Hanya Partai Berkarya yang mampu menembus ambang batas parlemen (*Parliamentary Treashold*) sebesar 4% dan meloloskan perwakilannya menembus level legislatif. Sedangkan 3 (tiga) partai lainnya gagal dalam kontestasi kuasa tersebut. Berturut-turut, Perindo mendapatkan suara 3,3 %; PSI sebesar 0,8 %; dan Partai Garuda hanya 0,4 %.

Tabel 1. Besaran angka perolehan partai politik di Provinsi Jambi

Partai Politik	2004	2009	2014	2019
Demokrat	5,18	14,46	16,46	10,4
Gerindra	-	4,34	11,42	11,7
PDI-P	11,02	9,65	14,06	14,5
Golkar	24,97	12,24	13	11,2
NasDem	-	-	5,75	5,8
Hanura	-	6,19	7,01	3,0
PKB	6,1	3,95	7,2	9,9
PAN	16,14	13,72	9,75	10,4
PPP	5,82	4,2	5,27	5,7
PBB	3,74	3,19	3,46	2,2
PKS	4,88	5,11	4,72	7,4
Perindo	-	-	-	3,3
Berkarya	-	-	-	4,0

Partai Politik	2004	2009	2014	2019
PSI	-	-	-	0,8
Garuda	-	-	-	0,4
PKPI	-	-	-	0,3

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (2019).

Setidaknya terdapat beberapa alasan yang mendasari kami mengkaji pelebagaan partai politik baru di Provinsi Jambi. *Pertama*, institusionalisasi yang telah dilakukan oleh partai-partai baru tidak mampu memenangkan pemilihan elektoral, kecuali Partai Berkarya yang hanya mendapatkan satu kursi di parlemen. Beberapa partai politik baru setidaknya telah melakukan proses pelebagaan partai secara terstruktur melalui jangkauan akar partai di masyarakat sebagaimana argumen para sarjana ilmu politik. *Kedua*, gaya atau kekhasan politik elektoral di Provinsi Jambi yang berbeda dengan karakteristik politik nasional. Partai politik yang ada memang didesain mengedepankan figur politik sebagai elemen penting dari proses pelebagaan. Temuan awal penelitian ini menjelaskan bagaimana kemantaban proses pelebagaan secara manajerial dan tata kelola organisasi tidak mampu menjangkau keterpilihan dihadapan masyarakat

Hal ini terjadi lantaran masyarakat menganggap figur memiliki kekuatan utama sebagai variabel penentu daripada program kerja, ideologi dan keteraturan partai dalam mengelola suatu organisasi. Oleh karena itu, perlunya figur yang dapat menjadi magnet politik guna memenangkan pemilihan. Karena memang karakteristik partai politik di Indonesia yang terklasifikasi sebagai partai elektoralis (Tomsa, 2012). Klasifikasi ini juga menempatkan aktivitas partai hanya terpusat pada momen pemilu sebagai satu-satunya sasaran penting dalam rangkaian organisasi sehingga hasil suara kontestasi elektoral dalam pemilihan merupakan tolak

ukur keberhasilan pada sebuah partai politik (Aminuddin & Ramadlan, 2015).

Beberapa literatur terdahulu yang membahas terkait pelebagaan partai politik sejauh ini menghadirkan perdebatan konsep serta teoritis terkait kecocokan dalam mengukur tingkat kelembagaan suatu partai politik. Perdebatan ini sering kali berangkat dari karakteristik atau konteks politik yang bekerja dalam sistem politik suatu negara. Kekhasan suatu negara menjadi komponen penting dalam melihat pelebagaan, dengan kata lain, konsep pelebagaan partai yang ditawarkan oleh berbagai akademisi politik sering kali melakukan generalisasi dalam memandang bekerjanya partai politik.

Literatur yang membahas pelebagaan sistem kepartaian di Indonesia salah satunya artikel yang ditulis Aurel Croissant dan Philip Volkel (2010) yang berupaya mengukur tingkat pelebagaan suatu negara dengan menggunakan dimensi pelebagaan yang ditawarkan oleh ilmuwan politik terdahulu. Indikator yang digunakan seperti *volatility*, identifikasi partai, kepercayaan partai, kontinuitas partai (Lihat Mark Jones, 2007). Penelitiannya dilakukan di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Temuannya mengatakan bahwa pelebagaan partai politik di Asia Tenggara terbukti lemah karena tingkat *volatility* yang tinggi, organisasi partai yang relatif tidak stabil, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga partai politik.

Senada dengan itu, tulisan Budiatri (2015) menjelaskan bahwa instabilitas sistem kepartaian di Indonesia disebabkan

oleh meningkatnya jumlah parpol semenjak pemilu 1999, yang pada akhirnya memberikan kebingungan tersendiri terhadap *voters*, karena banyaknya parpol yang tersedia. Penelitian yang dilakukan Andreas

Ufen (2008) tampaknya cukup berbeda dalam memandang sistem kepartaian di Indonesia. Ufen menggunakan konsep Mainwaring (1995) terkait stabilitas kompetisi antar partai serta konsep Levitsky (1998) terkait *value infusion* dan *behavioural routinization*. Temuannya yakni mengacu pada pola kompetisi yang dianggap stabil di pemilu 1950-an yang berdampak pada kompetisi pemilu pasca-reformasi. Trajektori kompetisi di tahun 1950-an tertuang dalam partai-partai sekarang, seperti PDI-P sebagai keberlanjutan dari ideologi PNI. Singkatnya, terdapat kontinuitas yang jelas dengan membandingkan antara sistem kepartaian 1955 dan pasca-reformasi. Serta temuan lainnya adalah munculnya partai presidensialisme, dimana kekuatan partai terletak pada individu ketua partai.

Meskipun ketiga literatur di atas menjelaskan konsep pelebagaan sistem kepartaian, namun penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap penelitian kami dengan melihat karakteristik pelebagaan partai di Indonesia. Akan tetapi, interpretasi kami terhadap penelitian tersebut cenderung menggeneralisasi institusionalisasi sistem kepartaian melalui perspektif nasional dengan cara membandingkan dengan negara lain. Kealpaan dari penelitian di atas adalah tidak melihat konteks masyarakat khususnya partikularitas di level lokal yang memiliki karakteristik politik berbeda dengan tren nasional.

Argumen penting dari artikel ini adalah parpol dalam level lokal tidak

memiliki otoritas sepenuhnya. Artikel ini memberikan kontribusi terkait bagaimana karakteristik masyarakat lokal yang cenderung teridentifikasi oleh figur, bukan oleh parpol. Dalam hal ini, pelebagaan parpol perlu diperkuat melalui rekrutmen politik melalui keberadaan figur politik.

Sebagaimana uraian di atas, artikel ini akan menguji bagaimana pelebagaan partai politik baru yang digagas oleh Randall dan Svasand pada pemilu 2019 di Provinsi Jambi. Kealpaan beberapa artikel sebelumnya adalah menempatkan figur politik sebagai entitas yang bertentangan dari pelebagaan partai. Argumen utama penulis adalah menempatkan lokus figur politik tidak dapat dipisahkan dari pelebagaan. Jika melihat konteks politik di Provinsi Jambi, dibutuhkannya figur politik guna menunjang keseimbangan organisasi partai. Tidak hanya membutuhkan kemampuan manajerial dan pengelolaan organisasi yang baik, tetapi sosok figur politik sebagai aspek penting terhadap penerimaan masyarakat dalam menentukan preferensi pilihannya.

2. KAJIAN LITERATUR

Setidaknya terdapat beberapa ilmuwan politik yang membahas konsep kelembagaan secara mendasar. Huntington dalam bukunya *Political Order in Chaning Societies* yang membahas pelebagaan secara lebih luas. Dalam suatu organisasi dapat dikatakan terlembaga apabila nilai yang diusung oleh suatu organisasi dapat diterima oleh masyarakat. Huntington (1968) juga memberikan empat dimensi kelembagaan dalam melihat organisasi; kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi dan koherensi.

Kemampuan beradaptasi diartikan sebagai kemampuan bertahan hidup suatu organisasi. Dalam kerangka fungsional, bagaimana organisasi dapat beradaptasi

dengan kelompok yang mereka wakili. Kompleksitas organisasi diukur melalui jumlah sub-unit. Otonomi mengacu pada derajat diferensiasi dari pengelompokan sosial dan metode perilaku. Koherensi berkaitan dengan konsensus dalam suatu organisasi, misal, dalam penyelesaian konflik.

Panebianco lebih lanjut menjelaskan kelembagaan yang berfokus pada partai politik, dengan melihat dua kriteria; tingkat otonomi dan kesisteman internal, ia berpendapat bahwa dalam praktik politik, otonomi dan kesisteman merupakan entitas yang saling berkaitan. Sedangkan Levitsky melihat parpol harus menginfusi nilai yang menjadi tujuan mereka kepada anggotanya, sehingga membuat partai menjadi terlembaga dengan baik karena nilai tersebut memberikan loyalitas anggota terhadap partainya. Kenneth Janda melihat kelembagaan partai dari dimensi eksternal, yakni bagaimana kuatnya keterjangkauan partai yang berada di masyarakat melalui nilai maupun identitas tertentu.

Literatur yang membahas terkait pelembagaan individu partai khususnya di Indonesia adalah tulisan Dirk Tomsa (2008) yang berjudul "Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Soeharto Era" yang menjelaskan pelembagaan Partai Golkar dengan menggunakan konsep institusionalisasi Randall dan Svasand. Pelembagaan Golkar semenjak runtuhnya Soeharto dianggap paling stabil daripada partai besar lainnya. Tomsa melihat dari dimensi systemness dan reification, aspek yang dilihat adalah keberhasilannya terkait fungsi maupun penyelesaian konflik yang dijalankan dan penerimaan publik terhadap parpol.

Di sisi lain, Tomsa juga menemukan bahwa aspek kelembagaan Golkar juga

dipengaruhi oleh warisan sistem lama yang bersifat hegemonik. Meskipun Tomsa juga bersepakat bahwa keterlibatan figur sebagai aspek yang bertentangan dengan pelembagaan, pada akhirnya tulisan tersebut tidak menegasikan aspek figur Soeharto sebagai bagian integral dari kelembagaan. Beberapa kekuatan politik Golkar juga disokong oleh para kroni-kroni Orde Baru yang loyal terhadap sosok Soeharto.

Artikel lain yang ditulis oleh Buehler dan Tan (2007) menjelaskan relasi partai politik dengan kelompok kepentingan di Kabupaten Gowa. Lemahnya pelembagaan partai, khususnya ketiadaan basis massa menjadi kesempatan oleh kelompok informal untuk mengokupasi sebuah parpol. Dalam nominasi kandidat Pilkada, pengambilan keputusan tidak ditentukan sepenuhnya oleh ketua partai, namun keputusan terletak di sektor informal. Adanya kelompok kepentingan yang kuat baik secara finansial maupun basis massa membuat keberadaan partai tidak bisa berdiri secara otonom, partai menggantungkan stabilitas organisasinya terhadap kelompok non-partai.

Dari penjelasan di atas kemudian menginspirasi penulis dalam memahami kelembagaan partai politik di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi. Kelembagaan diartikan sebagai proses dimana proses sebuah partai menjadi terlembaga secara mapan dalam pola perilaku dan sikap maupun budaya, yang terintegrasi satu sama lain (Randall & Svasand, 2002). Pelembagaan partai dapat dikategorisasikan menjadi dua aspek; aspek internal dan eksternal. Lebih lanjut kategori yang dibuat keduanya dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 2. Pelembagaan Partai Randall dan Svasand

Dimensi Kepartaian	Internal	Eksternal
<i>Structural</i>	<i>Systemness</i>	<i>Decisional Autonomy</i>
<i>Attitudinal</i>	<i>Value Infusion</i>	<i>Reification</i>

Sumber: (Randall & Svasand, 2002)

Proses pelembagaan ini terdapat dua aspek yakni aspek internal-eksternal dan aspek structural-attitudinal. Kedua aspek tersebut kemudian mengalami penyilangan sehingga, hasil dari penyilangan kemudian menjadi indikator yang menentukan partai terlembaga dengan baik atau tidak (Lihat Tabel 1). *Systemness* sendiri adalah istilah yang diambil dari Panebianco yang merupakan peningkatan ruang lingkup, kepadatan dan keteraturan yang membentuk partai sebagai sebuah struktur (Randall & Svasand, 2002). Dalam dimensi ini partai biasanya dipahami dalam hal elaborasi struktur formal dan pembangunan keanggotaan partai guna memperkuat stabilitas partai. *Value infusion* atau infusi nilai diambil dari istilah Levitsky yang mengacu pada sejauh mana aktor dan pendukung partai memperoleh identifikasi dan komitmen kepada partai dengan memberikan insentif yang bersifat instrumental. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan partai dalam menciptakan ideologi atau nilai yang dibawa dengan membentuk perilaku basis sosial yang loyal terhadap partai. *Decisional autonomy* suatu partai dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktor di luar partai. Dimensi ini melihat apakah partai memiliki ketergantungan kuat terhadap aktor eksternal. Dimensi yang terakhir adalah *reification*, hasil penyilangan antara aspek eksternal dan attitudinal yang melihat bagaimana imajinasi publik terhadap suatu partai dimaknai sebagai faktor pendorong dalam preferensi politiknya. Kemampuan partai untuk menempatkan dirinya dalam benak publik dilihat dari historitas partai

dan nilai-nilai simbolik yang berhasil mengklaim dirinya sebagai perwakilan masyarakat.

Memahami pelembagaan partai memberikan kontribusi terutama berkaitan dengan stabilitas dan ketahanan hidup partai politik. Randall dan Svasand (2002) sendiri menempatkan keberadaan partai politik secara lebih luas, keduanya melihat partai didasarkan pada asal-usulnya, pendanaan partai dan hubungan antara partai dan sosok pemimpin. Hal ini berarti kurang memperhatikan posisi partai yang menghendaki arena pertarungan (pemilu) sebagai bagian dari pelembagaan.

Di Indonesia sendiri, sarjana politik menganggap bahwa partai terklasifikasi sebagai *electoralist party*. Dimana arena pemilu sebagai ajang dari pertarungan antar partai sehingga memutuskan siapa yang berhak memerintah. Klasifikasi ini memberikan gambaran kecil bahwa meletakkan secara terpisah antara kedudukan partai sebagai organisasi dengan kontestasi elektoral sebagai sebuah masalah. Karena hal ini merupakan bagian dari fungsi dan tujuan utama partai politik selain mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, juga untuk memaksimalkan suara, memenangkan pemilihan, melakukan sirkulasi kekuasaan (Gunther & Diamond, 2001). Oleh karena itu, pelembagaan partai politik tidak hanya meletakkan partai yang hanya berfokus pada stabilitas organisasi, pengambilan keputusan, identitas nilai yang tertuang dalam empat dimensi yang telah dijelaskan di atas, namun juga perlu memperhatikan

bagaimana partai beroperasi di ranah elektoral.

3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini memilih partai politik baru di Provinsi Jambi yang mengikuti pemilihan umum legislatif 2019, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Berkarya sebagai objek kajian karena terdapat fenomena menarik. Untuk memahami kontestasi kekuasaan di daerah tersebut, penelitian kualitatif deskriptif ini mengandalkan kombinasi informasi sekunder dari berbagai sumber dan data primer dari hasil observasi, wawancara mendalam terhadap informan dari berbagai kalangan; baik politisi struktural partai, pengamat politik lokal, calon legislatif partai, serta tokoh masyarakat untuk memahami secara dalam hasil akhir nihilnya keterpilihan kursi parlemen yang ada. Penggalan informasi menggunakan kuesioner terbuka semi terstruktur dalam sejumlah kecil kasus untuk mengungkap fakta tentang fenomena yang ada (Joubish, Khurram, Ahmed, Fatima, & Haider, 2011).

Penentuan informan berdasarkan pemahaman terhadap data yang diperlukan yang diambil dari berbagai level lapisan infrastuktur politik (Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa), berbagai kalangan serta pemangku kepentingan di level masyarakat. Berbagai level tersebut hanya diambil beberapa perwakilan yang dianggap memiliki kemampuan dalam memberikan informasi yang objektif. Penggunaan metode ini dianggap tepat, karena dianggap mampu menjawab fenomena kegagalan partai politik baru pada kontestasi kekuasaan pemilu 2019 dalam perspektif kedaerahan, yakni pada Provinsi Jambi.

Berbagai data primer dan sekunder digunakan untuk memahami gejala-gejala atas fenomena yang terjadi. Analisis data

dilakukan dengan menggunakan interactive model analysis, dimana pada tahap awal dilakukan proses koding yang tersistematis untuk menemukan konsep, kategori serta membuktikan hipotesa awal (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Kemudian dilakukan analisis membandingkan dengan temuan penelitian terdahulu untuk menunjukkan kebaruan atau mengkonfirmasi teori yang ada. Disamping itu, dilakukan konfirmasi keabsahan data secara berulang melalui penelusuran informasi dengan cermat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kontestasi Elektoral Provinsi Jambi 2019

Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, Bagian penting yang menuntun lebih lanjut dalam mengkaji kegagalan partai politik baru pada kontestasi kekuasaan lokal yaitu dinamika kontestasi elektoral pemilu legislatif di Provinsi Jambi Tahun 2019 yang menempatkan antara kelembagaan dan figur partai sebagai peran utama keberlangsungan organisasi partai politik yang kemudian dikaitkan dengan karakteristik perilaku masyarakat yang ada dalam sebuah kontestasi. Beberapa partai besar lama di Provinsi Jambi seperti PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat telah menggambarkan hal tersebut dengan mampu bertahan dan tetap eksis hingga sampai sekarang.

PDI - Perjuangan misalnya, keluar sebagai partai pemenang pemilu legislatif di Provinsi Jambi tahun 2019 dengan jumlah 9 (sembilan) kursi. Hal itu dikarenakan partai tersebut telah memiliki positioning yang kuat di tengah masyarakat baik ranah nasional maupun lokal khususnya di Provinsi Jambi, dengan dijalankan oleh aktor yang memiliki kapasitas menjangkau akar rumput. Positioning politik adalah aktivitas untuk menanamkan kesan di

benak masyarakat agar mereka dapat membedakan ideologi dan program kerja yang dimiliki oleh suatu partai politik dengan ideologi dan program kerja partai politik lainnya (Taufik, 2014). PDI - Perjuangan berhasil menanamkan kesan di benak masyarakat luas dengan sosok tokoh berpengaruh di internal partai. Partai ini turun dengan tokoh utamanya yakni Edi Purwanto mantan calon wakil gubernur Provinsi Jambi Periode 2015-2020 yang pada akhirnya duduk sebagai ketua DPRD Provinsi Jambi. Selain itu, juga terdapat sosok Ihsan Yunus yang pada saat itu juga terpilih sebagai anggota DPR RI.

Sama halnya dengan PDI-P, Partai Gerindra juga menjadi salah satu partai di Provinsi Jambi juga sudah baik secara kelembagaan partai. Partai Gerindra di Jambi dikenal dengan tokoh utamanya yakni Sutan Adil Hendra yang berhasil mendapatkan 83.325 suara dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Partai Golkar menjadi partai yang memiliki tokoh ternama yang namanya tidak asing lagi di telinga masyarakat Provinsi Jambi, yaitu Hasan Basri Agus yang notabennya merupakan mantan Gubernur Provinsi Jambi Periode 2010-2015 sekaligus calon anggota legislatif nomor urut satu dari partai Golkar dalam pemilihan anggota DPR RI dengan perolehan suara sebanyak 200.291.

Kesuksesan partai Golkar di Jambi pada pemilu legislatif tahun 2019 dengan meloloskan 2 (dua) politisi mereka ke senayan tak lepas dari pengaruh tokoh elit yang banyak dalam tubuh partai Golkar Jambi. Hasan Basri Agus (HBA) dinilai menjadi salah satu tokoh yang mendongkrak suara Partai Golkar. Hal tersebut menjadi sebuah kerugian bagi partai Demokrat sebagai partai Hasan Basri Agus terdahulu yang kehilangan sosok tokoh elit ternama. Walaupun jumlah perolehan suara Demokrat menurun (Lihat

Tabel 1), positioning partai Demokrat masih terasa di kalangan masyarakat Jambi sehingga pada akhirnya mendapatkan satu kursi di DPR RI dengan mengusung Zulfikar Achmad politisi senior yang pernah mecalonkan diri sebagai Gubernur Jambi pada pilkada 2010.

Keempat partai tersebut menjadi sebuah gambaran dimana di Provinsi Jambi, dimana model partai politik memang didesain mengedepankan keseimbangan antara pelembagaan dan figur politik sebagai elemen penting dari proses sejauh mana partai politik terlembaga. Faktor tersebut dipengaruhi oleh perilaku memilih masyarakat Jambi yang masih terdorong atas basis figur. Partai-partai tersebut mampu menyelaraskan antara sistem dengan tokoh yang ada sehingga sampai saat ini keempat contoh partai tersebut mampu tetap bertahan dan eksis. Apa yang menjadi keberhasilan partai-partai lama ini tidak sepenuhnya ada pada partai-partai baru yang juga ikut berkontestasi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi Jambi, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

Keempat partai baru ini dianggap gagal meskipun secara sistem kepartaian telah terstruktur dan sistematis akan tetapi dalam hal pelembagaan, sebagaimana yang ditawarkan oleh Scott Mainwaring dan Timothy Scully (1995) soal empat dimensi utama terkait pelembagaan sistem kepartaian (stabilitas kompetisi antar partai, terjangkaunya akar rumput partai di level masyarakat, legitimasi partai, solidaritas sebuah partai dilihat dari tata kelola organisasi secara baik) sudah ada di tubuh internal partai-partai baru tersebut. Soal keberadaan partai di masyarakat misalnya, Perindo sudah menjangkau masyarakat dengan struktur politik sampai di tingkat kelurahan atau desa, bahkan partai berkarya sudah sampai pada tingkat RT/RW. Partai-

partai baru ini tidak memiliki tokoh sentral yang mumpuni seperti halnya partai lama yang kemudian partai tidak mampu menghasilkan keseimbangan antara positioning dengan kemenangan. Berbeda sedikit dengan Partai Berkarya yang hanya mampu mendapatkan satu kursi dengan meloloskan tokoh populer.

Kekalahan Partai Baru dalam Kontestasi Pemilu 2019

Berdasarkan beberapa temuan di atas, tersimpul sebuah dinamika dimana dalam konteks Provinsi Jambi yang sosio-kultural masyarakatnya masih tergolong primordial, akan terasa sulit ketika partai politik jika ingin menang tanpa tokoh sentral di tubuh partai. Hal ini yang menjadi faktor kegagalan keempat partai baru dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi Jambi kemarin. Sebagaimana konsepsi Tomsa (2012), karakteristik partai politik di Indonesia yang elektoralis, konsep menang atau kalahnya partai menjadi acuan baik atau tidaknya sebuah partai politik. Artinya jika keempat partai baru tersebut ingin terlihat baik dalam konteks Provinsi Jambi, pelembagaan partai melalui figur ataupun melalui ketokohan akan menjadi kunci sebuah partai politik untuk berhasil dan eksis di tengah masyarakat.

Pemilu pasca reformasi juga telah banyak menghadirkan partai-partai yang ikut bertarung dalam kontestasi. Dalam kondisi seperti itu pemilih tidak sepenuhnya bahkan tidak mampu mengingat nama-nama partai serta program-program yang di keluarkan oleh partai. Sehingga partai-partai yang ikut berkontestasi tidak mudah untuk dikenali lebih dalam bahkan dibedakan antar sesama partai. Melalui kasus ini, figur partai yang mencolok harus mampu mengambil peran bagaimanapun caranya baik itu melalui branding politik atau marketing politik hingga ia dapat menjadi sebuah alasan kenapa konstituen

ingat dengan partai tersebut bahkan sampai ada kemauan untuk memilih.

Sosok figur sangat dibutuhkan calon pemilih untuk menentukan partai politik pilihannya. Ketika identitas partai-partai politik terlanjur kabur, publik hanya bisa melihat dan menilai dari figur yang dimiliki oleh partai tersebut sebagai representasi dalam menilai kualitas partai politik (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012). Pasca orde baru, politik lokal di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh ikatan-ikatan emosional dan ikatan-ikatan primordialisme (Hutabarat, 2012). Masyarakat Provinsi Jambi sudah terbiasa dengan kehadiran tokoh sentral dalam partai. Zulkifli Nurdin bersama Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, dirinya menjelma menjadi tokoh besar dan menjadi arsitek kebesaran PAN di Jambi sejak awal era reformasi. Kepopularitasan PAN meningkat seiring dengan keberadaan Zulkifli Nurdin yang dikenal dan disukai oleh masyarakat ditambah dengan dirinya yang berhasil menjadi Gubernur Jambi selama dua periode. Setelah berakhirnya masa Zulkifli Nurdin, muncul sosok Zumi Zola Zulkifli (anak Zulkfli Nurdin) yang berhasil mengikuti rekam jejak sang ayah sebagai seorang Gubernur Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi tokoh mempunyai peran sentral dalam partai politik dan telah menjadi sebuah kebiasaan dikalangan masyarakat Jambi (Rusdi, 2019). Tokoh punya pengaruh yang kuat untuk menentukan pilihan para pemilih, semakin kuat afeksi seseorang kepada tokoh partai, maka kecenderungan individu untuk memilih partainya juga semakin kuat (Ridoi, 2016).

Dalam konteks masyarakat yang masih primordial tidak bisa disamakan dengan masyarakat modern, kondisi sosio-kultural masyarakat yang menjadi starting point bagaimana partai itu bergerak. Di Provinsi Jambi partai-partai baru seperti

Perindo, PSI, Garuda yang gagal mencapai menembus ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar 4% (Lihat tabel 1), penulis anggap gagal karena tidak memperhatikan kondisi iklim masyarakat yang sangat mengagungkan tokoh. Partai-partai baru tersebut punya beberapa nama tokoh yang tidak mampu mendongkrak suara partai padahal mereka dianggap sebagai tokoh utama dalam tubuh partai. Sebagai contoh partai PSI, Paizal kadni (caleg DPR RI no urut satu PSI dapil

Jambi, Ketua DPW PSI Provinsi Jambi), Ade Adrianus (Caleg DPRD Provinsi Jambi dapil Kerinci-Kota Sungai Penuh, Sekretaris DPW PSI Provinsi Jambi). Kedua nama ini terdengar asing di telinga masyarakat Jambi dan gagal mendapatkan kursi di parlemen, Paizal Kadni kalah eksis dengan tokoh utama partai lainnya Seperti Hasan Basri Agus (Golkar), Sofyan Ali (PKB), Sutan Adil Hendra (Gerindra), H. Bakri (PAN).

Tabel 3. Daftar Tokoh Partai-Partai Baru di Jambi

Nama	Partai	Keterangan
Paizal Kadni	PSI	Ketua DPW PSI Provinsi Jambi, Caleg DPR RI no urut 1 Dapil Jambi
Ade Adrianus	PSI	Sekretaris DPW PSI Provinsi Jambi, Caleg no urut 1 DPRD Provinsi Jambi dapil Kerinci-Kota Sungai Penuh
Agus Suyandi Roni	Perindo	Caleg DPR RI no urut 1 Dapil Jambi
H. Ambiar Usman	Berkarya	Ketua DPW Berkarya Jambi, Caleg DPRD Provinsi Jambi no urut 1 dapil Kota Jambi
Rusdi	Berkarya	Caleg DPRD Provinsi Jambi no urut 2 dapil Kota Jambi
Parta kusuma	Berkarya	Bendahara DPW Berkarya Jambi, Caleg DPRD Provinsi Jambi no urut 3 dapil Kota Jambi.
Grivan Magner	Garuda	Ketua DPD partai Garuda Provinsi Jambi, Caleg DPRD Provinsi Jambi no urut 1 dapil Kota Jambi.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Beberapa nama tokoh diatas diharapkan mampu mendongkrak suara partai-partai baru tersebut akan tetapi nyatanya gagal, hanya Rusdi melalui partai Berkarya yang mampu mendapatkan satu kursi di DPRD Provinsi Jambi. PSI yang mencoba mengejar segmen milenial nyatanya tidak berhasil karena tidak ada yang punya representasi ke anak muda (Adrianus, 2019). Begitu juga perindo yang dikenal dengan segmen pengusaha dan etnis tionghoa juga tidak berhasil karena tidak adanya representasi (Roni, 2019). Selain itu juga tidak sesuai dengan kultur

masyarakat Jambi yang tersegmen sesuai yang dimau oleh partai-partai baru tersebut.

Hal ini berbanding terbalik dengan gagasan Randall dan svasand (2002) soal tidak perlu adanya penyeimbangan antara pelembagaan partai politik dengan sosok figur atau tokoh dalam kontestasi Politik. Selain itu, yang perlu diperhatikan lebih jauh daripada sekedar bermodalkan pelembagaan yakni perlunya tokoh kuat yang dekat dengan masyarakat. Pada dasarnya, internal partai-partai baru telah memiliki struktur yang kuat hingga ke akar rumput, seperti penempatan rumah jaring

aspirasi di setiap tingkatan RT/RW, Berkarya misalnya, melaksanakan fungsinya sebagai parpol dengan cara mendekati diri kepada konstituen mereka. Rumah jaring aspirasi ini dibentuk untuk memfasilitasi keluhan-keluhan masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah (Usman, 2019). Di dalam tubuh partai baru, kecenderungan timbul konflik internal sangat tidak terlihat. Tidak adanya faksi-faksi dalam internal partai-partai baru. Hal ini berdampak pada berjalannya pelaksanaan prosedur, mekanisme maupun aturan yang tertuang dalam AD/ART partai itu sendiri.

Justru jika persoalan administratif dapat terselesaikan dengan baik, lantas mengapa partai baru cenderung tidak memperoleh kursi di parlemen. Yang menjadi pokok permasalahan pada partai baru adalah hilangnya sosok figur yang menjadi representasi kuat partai tersebut. Padahal, loyalitas kader-kader partai mereka terbentuk jauh sebelum masa pemilu berlangsung, dengan cara menyebarkan platform, program kerja dari partai yang diusungnya terhadap khalayak umum. Namun usaha kerja keras mereka tidak mendapatkan tempat di benak masyarakat, keluhan yang sering mereka alami adalah kurangnya partai untuk memiliki positioning yang ajeg sebagaimana uraian sebelumnya. Tidak adanya tokoh sentral yang mampu menaikkan popularitas partainya, meski mesin politik partai bekerja dengan keras, namun problem tersebut tidak dapat dihindarkan. Di samping itu, Randall dan Svasand (2002) juga berargumen bahwa perlunya lapisan sosial atau basis sosial yang menjadi organisasi think-tank partai politik dalam proses elektoral. Perindo misalnya, memiliki segmentasi kelompok seperti etnis tionghoa dan pengusaha lokal, namun karena daya dukungan mereka jauh lebih kecil dari kelompok lain, maka yang terjadi adalah

ketidakmampuan Perindo dalam meraup suara hingga ambang batas parlemen.

Hal serupa juga dialami oleh Berkarya yang menggunakan agen-agen politik dari partai lama (baca: Golkar) yang telah mengakar kuat. Meskipun menggunakan agen-agen lama, tetapi perolehan kursi yang didapatkan Berkarya tidak terlalu signifikan, mereka hanya mendapatkan satu kursi di parlemen. Hal ini tegambar secara jelas bahwa meski partai menggunakan pelembagaan sebagai strategi politiknya dengan memanfaatkan kekuatan internal berupa aspek administratif yang teratur, serta kekuatan eksternal berupa jejaring sosial yang telah mapan, namun persoalan preferensi pemilih terhadap partai tidak hanya dapat dilihat oleh kekuatan pelembagaan saja.

Terkait persoalan pengetahuan publik yang minim akan literasi tentang partai politik, membuat partai-partai baru kesusahan untuk mengkampanyekan organisasinya. Konteks sosio-politik yang terjadi di Jambi menghadirkan masalah bahwa identifikasi masyarakat terhadap partai terbilang cukup rendah. Mengapa demikian? Karena masyarakat tidak melihat identifikasi partai namun identifikasi terhadap figur yang ditokohkan dalam kontestasi politik. Ketika identifikasi terhadap figur kuat, maka partai dengan sendirinya dapat tumbuh dan berkembang dalam membentuk imajinasi publik. Terbukti pada Partai Demokrat, meskipun mereka kehilangan sosok figur yang kuat, namun Demokrat mampu bertahan dalam Pemilu 2019 dengan memperoleh suara sebesar 10,4 %, dan juga masuk dalam 5 besar partai pemenang di Jambi. Penulis beranggapan bahwa masyarakat hanya mendapatkan pengetahuan tentang partai politik apabila dikaitkan dengan figur yang melekat di dalamnya. Konsepsi yang ditawarkan Randall dan Svasand cenderung kurang membahasakan terkait dimensi

pelembagaan partai politik yang perlu memiliki keseimbangan dengan keberadaan figur atau tokoh dilihat dari ketidaksamaan pola ataupun iklim politik yang terjadi di ranah lokal (Surbakti, 2003).

Sebagaimana penjelasan di atas, pelembagaan partai tidak cukup untuk mengantarkan parpol menuju parlemen. Dikarenakan beberapa faktor; Pertama, persoalan kultur politik yang melekat pada masyarakat masih bersifat tradisional, aspek afektif melekat pada masyarakat sehingga persoalan figur/individu partai dinilai sangat penting (Rhodes & Hart, 2014, p. 369). Kedua, dominasi pengaruh yang kuat oleh individu terhadap partai, dimana partai tidak dapat berjalan secara organisasi tanpa kehadiran individu tersebut. Ketiga, adanya kultur patronase, yang melibatkan relasi kuasa yang timpang, mengapa ini terjadi, basisnya terletak pada faktor ekonomi. Orang yang memiliki status rendah atau inferior akan mudah dikendalikan oleh individu sehingga memungkinkan terjadinya personalisasi partai (Budiatri, et al., 2018).

Dengan kultur masyarakat yang tradisional, masyarakat masih menganggap persoalan figur tidak dapat dipisahkan urusan politik elektoral meski terdapat institusi politik yang bersifat modern. Bahkan, dalam pemerintahan era Orde Lama dan Orde Baru, figur Soekarno dan Soeharto menjadi faktor determinan dalam menentukan arah kebijakan (Crouch, 1979). Di samping itu, penulis juga melihat tipologi partai politik di Indonesia juga bisa menentukan karakteristik partai dalam bekerja. Karena tipologi partai di Indonesia bersifat elektoralis, partai hanya menjadikan momen pemilu sebagai sesuatu yang fundamental, padahal partai memiliki banyak tugas maupun fungsi di luar momen pemilu. Partai yang terkategorisasi sebagai elektoralis, banyak melakukan perampangan organisasi, keberadaan

organisasinya relatif sederhana (Gunther & Diamond, 2001). Namun, saat terjadi pemilihan, mereka seketika bertindak secara responsif dengan cara mengadakan agenda kampanye besar-besaran.

Oleh karena itu, meski persoalan figur dan pelembagaan partai bersifat kontradiktif, setidaknya perlu optimis dalam memandang bagaimana keberlangsungan partai politik khususnya partai baru. Partai baru yang berkompetisi di Provinsi Jambi tidak bisa hanya mengandalkan persoalan pelembagaan partai dalam hal mengatur tata kelola manajerial organisasi maupun membangun akar sosial yang kuat. Perlu melibatkan figur sebagai variabel pendukung dengan tujuan memenangkan pemilu dan masuk ke dalam kursi parlemen.

Kurangnya perhatian berbagai sarjana politik yang menganggap bahwa penempatan figur politik sebagai entitas yang bertentangan dari pelembagaan partai. Sehingga dalam konteks lokal Provinsi Jambi figur partai tidak dapat dipisahkan dari pelembagaan. Melalui beberapa temuan di atas telah menggambarkan bagaimana dinamika yang ada sehingga dalam tulisan ini bermaksud untuk mengisi kekosongan kajian yang belum ada sebelumnya serta menyolidkan gagasan Randall dan Svasand soal keseimbangan pelembagaan dengan figur partai.

Dalam hal ini, pelembagaan parpol perlu diperkuat melalui rekrutmen politik melalui keberadaan figur politik. Beberapa literatur menjelaskan bahwa rekrutmen politik dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu atau kelompok-kelompok dilibatkan dalam peran-peran politik secara aktif (Bakar, 2013). Lebih lanjut, yang perlu ditekankan bahwa pelibatan yang dimaksudkan sebagai upaya menarik kandidat yang potensial untuk bersaing dalam merebut jabatan publik (Pamungkas, 2011). Partai-partai baru ini

melalui rekrutmen politik-nya belum mampu menghadirkan sosok tokoh yang di kenal dan dekat dengan masyarakat Jambi sehingga dapat mengangkat elektabilitas dan jumlah suara partai-partai baru tersebut.

5. PENUTUP

Inti dari terlembaganya sebuah partai politik adalah, bagaimana partai politik tersebut bisa bertahan dari satu pemilu ke pemilu lainnya dengan cara mendapatkan legitimasi dan suara rakyat (Ridha, 2016). Kegagalan Partai-partai baru, PSI, Perindo, Garuda dan partai berkarya dalam kontestasi Pemilihan Legislatif 2019 di Provinsi Jambi kemarin dikarenakan tidak mampu mendorong kearah dimana dalam konteks sosio-kultural masyarakat yang masih tradisonal perlu adanya keseimbangan antara pelembagaan dan figur.

Keempat partai baru tersebut secara umum sudah terstruktur dan tersistem dengan baik di ranah pusat. Hanya saja ada beberapa kekurangan dalam konteks lokal dimana keempat partai baru ini tidak mampu menghadirkan sosok figur yang mumpuni, tidak seperti partai-partai lama di Provinsi Jambi yang menjadikan figur sebagai strategi utama dalam mendongkrak suara partai pada kontestasi elektoral pemilihan legislatif 2019 yang lalu.

Dari beberapa data tersebut, sangat jelas bahwa gagasan Randall dan Svasand tidak mampu menjangkau masyarakat yang memiliki kultur tradisonal. Dengan temuan baru, penulis berupaya menyolidkan gagasan mereka agar tidak hanya terjebak pada statement yang bersifat proseduralistik saja, namun pelembagaan perlu mementingkan bagaimana partai tersebut dapat berlangsung dan bertahan hidup dengan cara meraih suara sebanyak-banyaknya saat kontestasi pemilu berlangsung.

Partai-partai baru di Provinsi Jambi sudah berupaya memunculkan tokoh mereka, akan tetapi masih kalah saing dengan tokoh utama partai-partai lama lainnya. Penulis menyarankan rekrutmen yang baik menjadi sebuah pilihan partai-partai baru tersebut agar mendapatkan tokoh yang mumpuni sehingga mampu survive membangkitkan elektabilitas partai, untuk bisa terus eksis pada pemilu-pemilu yang akan datang khususnya di Provinsi Jambi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus, A. (2019, 11). Wawancara PSI Jambi. (H. A. Muhammad, Pewawancara)
- Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. (2015). Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, 1(1), 40-74.
- Bakar, A. (2013). Politik Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik, pengalaman DPC PDIP dan keluarga Banteng di kepulauan selayar. *Al-daulah*, 112.
- Budiatri, A. P. (2015). Pelembagaan Sistem Kepartaian Di Bawah Sistem Demokrasi Indonesia (1998 - Sekarang). *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 33-54.
- Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Amalia, L. S., . . . Hanafi, R. I. (2018). Personalisasi Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 289-306.
- Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Southeast Asia Program Publications at Cornell*, 41-69.
- Croissant, A., & Volkel, P. (2010). Party system types and party system institutionalization: Comparing new

- democracies in East and Southeast Asia. *Party Politics*, 21(3), 1-31.
- Crouch, H. (1979). *Patrimonialism and Military Rule in Indonesia*. *World Politics*, 31(4), 571-587.
- Gunther, R., & Diamond, L. (2001). Types and Functions of Parties. Dalam L. Diamond, & R. Gunther, *Political Parties and Democracy* (hal. 3-39). Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Huntington, S. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Heaven, CT: Yale University Press.
- Hutabarat, M. P. (2012). Fenomena "Orang Kuat Lokal" di Indonesia Era Desentralisasi, Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi. Tesis, 48.
- Key, Jr., V. O. (1964). *Politics, and Pressure Groups*. New York: Thomas Y. Crowell Company.
- Levitsky, S. (1998). Institutionalization and Peronism: the concept, the case and the case for unpacking the concept. *Party Politics*, 4(1), 77-92.
- Lutfi, M. (2012). Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal, (Studi tentang pelembagaan partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca kekalahan pada pemilu 2009). Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM.
- Mainwaring, S. P., & Scully, T. R. (1995). Introduction: Party Systems in Latin America. Dalam S. P. Mainwaring, & T. R. Scully, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America* (hal. 1-34). Stanford: Stanford University Press.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat, Analisis tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for democracy and welfarism.
- Randall, V., & Svasand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics*, 8(1), 5-29.
- Rhodes, R. A., & Hart, P. T. (2014). *Handbook of Political Leadership*. Oxford: Oxford University Press.
- Ridha, M. (2016). Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal : Fenomena Politik Klan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov*, 181.
- Ridoi, M. (2016). Kekuatan Figur Dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa). Skripsi, 29.
- Roni, A. S. (2019, 11). Wawancara Perindo Jambi. (H. A. Muhammad, Pewawancara)
- Rusdi. (2019, 10). Wawancara Caleg DPRD Jambi. (H. A. Muhammad, Pewawancara)
- Surbakti, R. (2003). Perkembangan Partai Politik di Indonesia. *Indonesia in Transition : Work in Progress*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 51-66.
- Taufik, M. (2014). Analisis Brand Positioning Partai Politik di Indonesia (Studi Kasus: Golkar, Demokrat, PDIP, PKS, Gerindra). Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Tomsa, D. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the post-Soeharto era*. New York: Routledge.
- Tomsa, D. (2012). What Type of Party? Southeast Asian Parties Between Clientelism and Electoralism. Dalam D. Tomsa, & A. Ufen, *Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition Indonesia, Thailand and The Philippines* (hal. 20-38). New York: Routledge.

- Ufen, A. (2008). Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: lessons for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand. *The Pacific Review*, 21(3), 327-350.
- Usman, H. A. (2019, 11). Wawancara Berkarya Jambi. (H. A. Muhammad, Pewawancara)
- Wallis, D. (2003). Democratizing a Hegemonic Regime: From Institutionalized Party to Institutionalized Party System in Mexico? *Democratization*, 10(3), 15-38.